

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH, INVESTASI DAN
TENAGA KERJA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI 10
PROVINSI DI PULAU SUMATERA PERIODE 2011-2019**

SKRIPSI

Oleh

Safa Adhytia Putri



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH, INVESTASI DAN TENAGA KERJA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI 10 PROVINSI DI PULAU SUMATERA PERIODE 2011-2016

**Oleh:
Safa Adhytia Putri**

Pengeluaran pemerintah merupakan tindakan untuk mengatur jalannya perekonomian dengan menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah, Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator keberhasilan pelaksanaan yang dapat di jadikan tolak ukur secara makro. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh dari pengeluaran pemerintah, investasi dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi 10 Provinsi di Pulau Sumatera. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPk) dengan periode penelitian yaitu 2011-2016. Penelitian ini menggunakan model data panel yaitu kombinasi data runtut waktu (*time series*) dan data silang tempat (*cross section*) dengan estimasi model *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa variabel bebas Belanja Pegawai (BP), Belanja Barang (BB), Belanja Modal (BM), Investasi (INV) dan Tenaga Kerja (TK) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera.

Kata Kunci :Belanja Barang, Belanja Modal, Belanja Pegawai, Investasi, Pertumbuhan Ekonomi, Tenaga Kerja.

ABSTRACT

EFFECT OF GOVERNMENT EXPENDITURE, INVESTMENT AND LABOR ON ECONOMIC GROWTH OF 10 PROVINCES IN SUMATERA PERIOD 2011-2016

**By:
Safa Adhytia Putri**

Government expenditure is an action to regulate the economy by determining the amount of government revenues and expenditures. Economic growth is an indicator of successful implementation that can be made as a macro benchmark. This study aims to see how the influence of government spending, investment and labor on economic growth in 10 provinces in Sumatra Island. This study uses secondary data obtained from the Central Statistics Agency (BPS) with the research period, 2011-2016. This study uses a panel data model that is a combination of time series data (time series) and cross-site data (cross section) with estimates of the Fixed Effect Model (FEM) model. The results of this study can be summarized that the independent variables of Employee Expenditure (BP), Goods Expenditure (BB), Capital Expenditure (BM), Investment (INV) and Labor (TK) have a significant effect on economic growth in Sumatra.

Keywords :Economic Growth, Employee Expenditure, Goods Expenditure, Capital Expenditure, Investment, Labor.

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH, INVESTASI DAN
TENAGA KERJA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI 10
PROVINSI DI PULAU SUMATERA PERIODE 2011-2019**

Oleh

Safa Adhytia Putri

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA EKONOMI

pada

Jurusan Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH,
INVESTASI DAN TENAGA KERJA TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI 10 PROVINSI
DI PULAU SUMATERA PERIODE 2011-2016**

Nama Mahasiswa : **Safa Adhytia Putri**

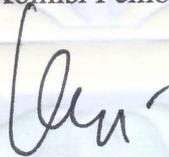
No. Pokok Mahasiswa : **1411021096**

Jurusan : **Ekonomi Pembangunan**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**

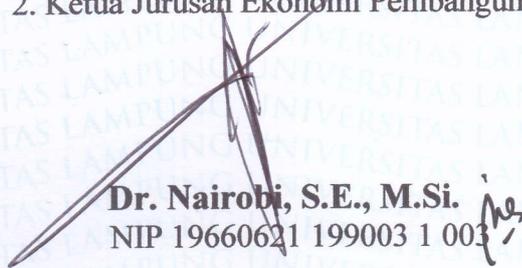
MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**



Moneyzar Usman, S.E., M.Si.
NIP 19600621 198603 1 002

2. **Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan**

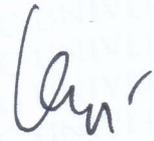


Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP 19660621 199003 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

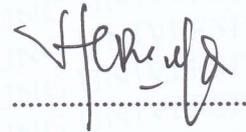
Ketua : **Moneyzar Usman, S.E., M.Si.**



Penguji I : **Dr. Marselina, S.E., M.P.M.**



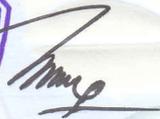
Penguji II : **Dr. Heru Wahyudi, S.E., M.Si.**



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.
NIP 19610904 198703 1 011



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **11 Februari 2019**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan bukan merupakan penjiplakan hasil karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi ketentuan yang berlaku.

Randa Lamping, 11 Februari 2019



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Safa Adhytia Putri yang lahir di Serang pada tanggal 13 Desember 1995, merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Agus Wardoyo dan Ibu Widia Sari.

Penulis mengawali pendidikan formal pada tahun 2002 di TK Andhika Cilegon, Banten yang diselesaikan pada tahun 2003. Penulis melanjutkan Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Cilegon, Banten yang diselesaikan pada tahun 2008. Penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 25 Bandar Lampung yang diselesaikan Pada tahun 2011 dan melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 3 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2014.

Pada tahun 2014 penulis diterima di Universitas Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Ekonomi Pembangunan melalui jalur SNMPTN. Selama masa kuliah penulis juga telah mengikuti beberapa kegiatan organisasi kampus, diantaranya sebagai anggota Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (Himepa). Pada tahun 2017, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kecamatan Seputih Agung Desa Dono Arum Kabupaten Lampung Tengah selama 40 hari.

MOTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau telah selesai (dari satu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan lain) dan hanya Kepada Tuhanmu engkau berharap”

(Qs. AL-Insyirah, 6-8)

“Ketika kamu merasa lemah, ingatlah doa dan semangat orang tuamu selalu menyertaimu”

(Inneke Frastika Amanda)

“Sekali kamu menentukan harapan, maka semuanya sangat mungkin terwujud”

(Christopher Reeve)

“Setiap manusia diciptakan dengan kemampuan yang berbeda-beda maka berusahalah tetap berusaha lagi, lagi dan lagi”

(Safa Adhytia)

PERSEMBAHAN

Dengan segenap rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan, ku persembahkan skripsi ini dengan segala ketulusan dan kerendahan hati kepada:

- ❖ Keluargaku tercinta Ayah, Ibu, Buyah dan Salsa, yang penuh ketulusan selalu menyayangi, mengasihi, dan memberikan motivasi untuk terus maju. Terima kasih untuk semua perjuangan yang kalian berikan, untuk kesabaran, pengertian dan kepercayaan yang begitu besar dalam mendukung semua pencapaian penulis, serta doa yang tiada henti sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Para Dosen yang telah begitu berjasa memberikan bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi penulis
- ❖ Sahabat-sahabat dan para kerabat tercinta yang selalu memberikan saran, motivasi, dan semangat penulis.
- ❖ Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.

SANWACANA

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan nikmat-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Ekonomi Pembangunan. Skripsi ini berjudul “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Sumatera Periode 2011-2106”. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari peranan dan bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan dan bantuan selama proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hi. Satria Bangsawan, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Emi Maimunah, S.E., M.Si. selaku Sekertaris Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Bapak Moneyzar Usman, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, motivasi, saran dan nasihat, hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Ibu Dr. Marselina, S.E., M.P.M. selaku Dosen Penguji yang telah banyak

memberi masukan, saran dan nasihat, hingga skripsi ini dapat terselesaikan

6. Bapak Dr. Heru Wahyudi, S.E., M.Si. selaku Dosen Penguji yang telah banyak memberi masukan, saran dan nasihat, hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Bapak Imam Awaludin, S.E., M.E. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu meluangkan waktu untuk memberikan motivasi, nasihat dan bantuannya selama proses pendidikan penulis di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
8. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan ilmu dan pelajaran yang bermanfaat selama perkuliahan.
9. Seluruh Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis terutama Jurusan Ekonomi Pembangunan Ibu Yati, Pak Udin dan Mas Rully yang telah membantu penulis selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
10. Orang tuaku, ayah Agus Wardoyo, ibu Widia Sari dan buyah Gunadi Ibrahim yang dengan penuh kasih selalu memberikan motivasi, dukungan, doa, dan semangat untuk penulis, serta menjadi pendorong bagi penulis untuk tidak menyerah dalam mengejar cita-cita untuk membanggakan kalian.
11. Saudari kandungku Salsa, yang telah memberi dukungan, bantuan, serta yang selalu dengan besar hati mendengarkan keluh kesah penulis.
12. Sahabat-sahabatku, Tanzia, Sela, Elsa, April, Dian, Maghfirah, Syfa, Atika, dan Friscin. yang selalu menjadi pelipur lara serta setia menemani tertawa bersama, membantu memberi solusi kepada penulis selama menempuh pendidikan di kampus ini.
13. Teman-teman seperbimbingan, Ka April, Ka Nia, Bang Ditto dan Ka Wayan,

terimakasih telah berjuang bersama-sama dalam proses penyelesaian skripsi.

14. Teman-teman Seperkonsentrasian, Syailendra, Nuramalia, Esa, Dian, Ismaya, Debby, Dwi, Bella, Deshinta, Eva, Tsarah, Rahma, Dinda, Rido, Suma, Andri dan Diki.
15. Sepupu-sepupuku, Ainin, Atunay, Ajeng, Tata, Oti, Pujian, Onek, Salwa, yang selalu menghibur di saat sedih, meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah.
16. Seluruh teman-teman Ekonomi Pembangunan 2014 yang belum dapat penulis sebutkan satu per satu, terimakasih atas segala dukungan kepada penulis. Sukses untuk kita semua.
17. Keluarga KKN Kecamatan Seputih Agung Desa Dono Arum Kabupaten Lampung Tengah, Bang Jihad, Bang Lukman, Mba Mari, Tomo, Ayu dan Ellen, terimakasih atas kebersamaan dan pembelajaran hidup selama 40 hari.
18. Keponakan-keponakanku, Kinar, Ghania dan Kana yang selalu menjadi penghilang penat dan sebagai penghibur.
19. *Best Partner*, Thohir Hasan. Terimakasih atas waktu yang telah di luangkan bantuan yang di berikan serta dukungan dan motivasi kepada penulis.
20. Semua pihak yang telah membantu demi terselesaikan skripsi yang tidak dapat penulis disebutkan satu persatu.

Akhir Kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 11 Februari 2019

Safa Adhytia Putri
NPM: 1411021096

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Landasan Teori.....	9
1. Pengeluaran Pemerintah	9
2. Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi.....	13
3. Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi	17
4. Angkatan Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi	22
5. Modal Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi	24
6. Pertumbuhan Ekonomi	30
B. Tinjauan Empiris.....	33
C. Kerangka Berfikir	37
D. Kerangka Pemikiran.....	38
E. Hipotesis	38
III. METODE PENELITIAN	40
A. Jenis dan Sumber Data.....	40
B. Definisi Operasional Variabel.....	40
C. Metode Analisis	42
1. Metode Data Panel.....	43
2. Pemilihan Model Data Panel	46
3. Pengujian Hipotesis	47
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	51
A. Gambaran Umum Subjek Penelitian.....	51
B. Analisis Deskriptif.....	51
1. Pertumbuhan Ekonomi	51
2. Belanja Pegawai.....	53
3. Belanja Barang.....	54

4.	Belanja Modal	55
5.	Investasi	56
6.	Tenaga Kerja	57
C.	Hasil Pengujian	59
1.	Uji Kriteria Pemilihan Model Penelitian	59
2.	Hasil Estimasi Regresi	60
3.	Uji Statistik	61
4.	Uji F-statistik	62
5.	Koefisien Determinasi (R^2).....	62
D.	Pembahasan.....	63
1.	Pengaruh Belanja Pegawai (BP) terhadap Pertumbuhan Ekonomi .	63
2.	Pengaruh Belanja Barang (BB) terhadap Pertumbuhan Ekonomi ...	65
3.	Pengaruh Belanja Modal (BM) terhadap Pertumbuhan Ekonomi ...	66
4.	Pengaruh Investasi (INV) terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	67
5.	Pengaruh Tenaga Kerja (TK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi	69
V.	KESIMPULAN DAN SARAN.....	73
A.	Kesimpulan	73
B.	Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 1. Realisasi Pengeluaran Pemerintah di Pulau Sumatera Periode 2011-2016.	4
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu	33
Tabel 3.1. Data dan Sumber Data	41
Tabel 4.1. Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Sumatera Periode 2011-2016	52
Tabel 4.2. Belanja Pegawai di Pulau Sumatra Periode 2011-2016.....	53
Tabel 4 3. Belanja Barang di Pulau Sumatera periode 2011-2016	54
Tabel 4.4. Belanja Modal di Pulau Sumatera Periode 2011-2016	56
Tabel 4.5. Investasi di Pulau Sumatera Periode 2011-2016.....	57
Tabel 4.6. Tenaga Kerja di Pulau Sumatera Periode 2011-2016	58
Tabel 4.7. Hasil Uji Chow.....	59
Tabel 4.8. Hasil Uji Hausman	60
Tabel 4.9. Kesimpulan Pemilihan Model.....	60
Tabel 4 10. Hasil Estimasi Panel Data dengan pendekatan <i>Fixed Effect Model</i> (FEM), <i>Random Effect Model</i> (REM) dan <i>Common Effect Model</i> (CEM).....	61
Tabel 4.11. Hasil Uji t-Statistik.....	62
Tabel 4.12. Hasil Uji F-statistik	62

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 1. Rata-rata Investasi Swasta 10 Provinsi di Pulau Sumatera Periode 2011-2016.	5
Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran	38

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dapat dijadikan tolok ukur secara makro. Akan tetapi, meskipun telah digunakan sebagai indikator pembangunan, pertumbuhan ekonomi masih bersifat umum dan belum mencerminkan kemampuan masyarakat secara individual. Pembangunan daerah diharapkan akan membawa dampak positif pula terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi daerah dapat dicerminkan dari perubahan PDRB dalam suatu wilayah.

BPS (2018), mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini khususnya di Pulau Jawa memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto sebanyak 58,49 persen dengan pertumbuhan 5,61 persen, diikuti oleh Sumatera sebesar 21,66 persen dengan pertumbuhan 4,3 persen, dan Kalimantan 8,2 persen dengan pertumbuhan 4,33 persen. Para ekonom menggunakan model permintaan dan penawaran agregat untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi. dalam model permintaan agregat (*aggregate demand*), pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya adalah konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah ataupun net ekspor ($Y = C + I + G$). Pertumbuhan suatu ekonomi regional juga tidak lepas dari peran pengeluaran pemerintah di sektor layanan publik. Wibisono (2003), pengeluaran pemerintah daerah diukur dari total belanja rutin dan belanja

pembangunan yang dialokasikan dalam anggaran daerah. Semakin besar pengeluaran pemerintah daerah yang produktif maka semakin memperbesar tingkat perekonomian suatu daerah.

Pengeluaran pemerintah adalah hal yang sangat penting karena menyangkut output yang dihasilkan. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Mangkoesobroto, 1993).

Sebagai negara berkembang, pemerintah memiliki peran penting dalam mempercepat pembangunan ekonomi. Berbagai kebijakan dilakukan dalam pencapaian tujuan pembangunan ekonomi. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap penerimaan dan pengeluaran untuk mencapai tujuan seperti pertumbuhan ekonomi dan stabilitas perekonomian secara umum. Perubahan tingkat dan komposisi anggaran pemerintah baik pajak maupun pengeluaran pemerintah, dapat mempengaruhi variabel-variabel permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi, pola persebaran sumber daya dan distribusi pendapatan.

Pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk Nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan

harga, tingkat output, maupun kesempatan kerja dan memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi (Anitasari, 2014).

Menurut Direktorat penyusunan APBN Indonesia (2014), menurut jenis belanja, anggaran belanja pemerintah dibagi ke dalam; belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial dan belanja lainnya. Dalam penelitian ini pengeluaran pemerintah yang digunakan berupa belanja pemerintah yaitu belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

Pengeluaran pemerintah di Indonesia dari tahun ketahun mengalami kenaikan, pengeluaran pemerintah yang cukup tinggi berada di Provinsi Jawa kemudian Sumatera berada di posisi kedua di mana kita tahu Pulau Sumatera memiliki potensi sumber daya yang cukup tinggi akan tetapi di Pulau Sumatera belum mampu bersaing dalam hal teknologi dibandingkan dengan Pulau Jawa. Alasan lainnya karna Pulau Jawa merupakan sentral pemerintahan dan perekonomian di Indonesia

Pulau Sumatera memiliki banyak industri perikanan dan minyak kelapa yang dikelola oleh pihak swasta. Hal ini merupakan kenyataan bahwa investasi swasta di Indonesia khususnya di Pulau Sumatera bisa dibbilang cukup besar. Kondisi ini memberikan dampak bagi perekonomian di Pulau Sumatera antara lain dengan kehadiran industri-industri tersebut telah menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran di Pulau Sumatera. Hal lebih penting juga untuk diketahui adalah tentang pengaruh investasi di Pulau Sumatera terhadap pertumbuhan ekonomi. Berikut tabel Realisasi pengeluaran pemerintah di Pulau Sumatera periode 2011-2016.

Tabel 1 1. Realisasi Pengeluaran Pemerintah di Pulau Sumatera Periode 2011-2016.

Provinsi	Pengeluaran Pemerintah (Ribu Rupiah)			
	2011	2013	2016	Rata-rata
Nanggroe Aceh	8917046	11784687	12653240	59.116343
Sumatera Utara	5363366	8866922	10976894	40.301586
Sumatera Barat	2406382	3431714	4876171	18.137090
Riau	5861960	8432096	10075132	45.203592
Jambi	2432067	2652826	3381884	16.219039
Sumatera Selatan	4354299	6064031	6627641	30.606543
Bengkulu	1206660	1771513	2491650	9.785930
Lampung	2689172	4410729	5691234	21.374588
Bangka Belitung	1433929	1919258	2287560	9.495719
Kepulauan Riau	2251884	22670464	2852614	14.270019

Sumber : *Badan Pusat Statistik (BPS)*, 2017.

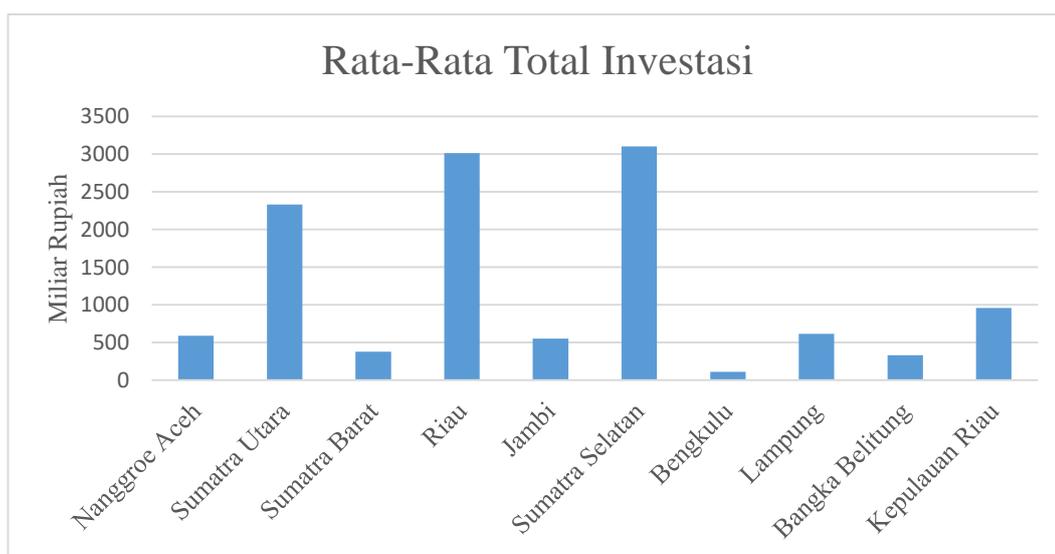
Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di Pulau Sumatera secara umum cukup bervariasi. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa penggeluaran pemerintah tertinggi berada di Provinsi Nanggroe Aceh dengan rata-rata sebesar 59.116343 sedangkan pengeluaran pemerintah terendah terdapat di Provinsi Bangka Belitung dengan rata-rata sebesar 9.495719. pengeluaran pemerintah yang tinggi di suatu wilayah bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Selain dipengaruhi pengeluaran pemerintah, ada beberapa variabel lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera, tidak terlepas dari pertumbuhan faktor utama proses investasi pembangunan, yaitu pembentukan modal. Dalam penelitian ini investasi yang dimaksud adalah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Menurut Pangestu (1996), hubungan antara investasi dengan pertumbuhan ekonomi adalah positif, di mana jika investasi tinggi maka pertumbuhan ekonomi cenderung meningkat.

Dalam teori ekonomi makro dari sisi pengeluaran pendapatan regional bruto adalah penjumlahan dari berbagai variabel termasuk di dalamnya adalah investasi.

Ada beberapa hal yang sebenarnya berpengaruh dalam soal investasi ini. Investasi sendiri terdiri dari investasi asing dan domestik. Investasi yang terjadi di daerah terdiri dari investasi pemerintah dan investasi swasta. Investasi dari sektor swasta dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri (asing). Investasi pemerintah dilakukan guna menyediakan barang publik. Besarnya investasi pemerintah dapat dihitung dari selisih antara total anggaran pemerintah dengan belanja rutinnya. Menurut Sukirno (2000), kegiatan investasi merupakan salah satu komponen pengeluaran agregat, penambahan modal sebagai akibat dari investasi akan menambah kapasitas produksi sehingga akan meningkatkan output yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan Gambar 1.1 tingkat investasi di Pulau Sumatera periode 2011-2016 menunjukkan bahwa investasi PMDN dan PMA mengalami kenaikan dan penurunan. Rata-rata total investasi tertinggi terjadi di Sumatera Selatan sebesar 3102,9 miliar rupiah. Rata-rata total investasi terendah terjadi di Provinsi Bengkulu sebesar 108 miliar rupiah.



Gambar 1.1. Rata-rata Investasi Swasta 10 Provinsi di Pulau Sumatera Periode 2011-2016.

Seiring dengan meningkatnya perkembangan ekonomi yang berusaha mengarah pada semakin kondusifnya yang memberikan pengaruh pada berkembangnya penanaman modal baik PMDN dan PMA. Selain investasi maka tenaga kerja merupakan suatu faktor yang mempengaruhi output suatu daerah. Angkatan kerja yang besar akan terbentuk dari jumlah penduduk yang besar. Namun pertumbuhan penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan efek yang buruk terhadap pertumbuhan ekonomi.

Menurut Todaro (2000) pertumbuhan penduduk yang cepat mendorong timbulnya masalah keterbelakangan dan membuat prospek pembangunan menjadi semakin jauh. Selanjutnya dikatakan bahwa masalah kependudukan yang timbul bukan karena banyaknya jumlah anggota keluarga, melainkan karena mereka terkonsentrasi pada daerah perkotaan saja sebagai akibat dari cepatnya laju migrasi dari desa ke kota. Namun demikian jumlah penduduk yang cukup dengan tingkat pendidikan yang tinggi dan memiliki skill akan mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Dari jumlah penduduk usia produktif yang besar maka akan mampu meningkatkan jumlah tenaga kerja yang tersedia dan pada akhirnya akan mampu meningkatkan produksi output suatu daerah.

Tenaga kerja diduga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Peningkatan tenaga kerja yang diimbangi dengan peningkatan output yang dihasilkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Meningkatnya jumlah tenaga kerja akan memungkinkan suatu daerah untuk menambah produksinya dalam menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat menurut Sukirno (dalam Barimbing dan Karmini, 2015). Menurut Todaro (2000:112) pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional dianggap

sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi, jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah tingkat produksi.

Berdasarkan dari latar belakang yang sudah dipaparkan di atas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul “Pengaruh pengeluaran pemerintah, investasi dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi 10 Provinsi di Pulau Sumatera periode 2011-2016”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penulisan penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, investasi dan tenaga kerja secara masing-masing terhadap pertumbuhan ekonomi 10 Provinsi di Pulau Sumatera?
2. Apakah ada pengaruh belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, investasi dan tenaga kerja secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi 10 Provinsi di Pulau Sumatera?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, invstasi dan tenaga kerja secara masing-masing terhadap pertumbuhan ekonomi 10 Provinsi di Pulau Sumatera.
2. Untuk mengetahui pengaruh belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, investasi dan tenaga kerja secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi 10 Provinsi di Pulau Sumatera.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari hasil penelitian diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu syarat penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk penulis sebagai bentuk pengaplikasian ilmu yang telah diterima selama proses perkuliahan.
3. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sarana mempelajari pengaruh pengeluaran pemerintah, investasi dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi 10 Provinsi di Pulau Sumatera.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengeluaran Pemerintah

Dalam kebijakan fiskal dikenal ada beberapa kebijakan anggaran yaitu anggaran berimbang, anggaran surplus dan anggaran defisit. Dalam pengertian umum, anggaran berimbang yaitu suatu kondisi dimana permintaan sama dengan pengeluaran. Anggaran surplus yaitu pengeluaran lebih kecil dari penerimaan. Sedangkan anggaran defisit yaitu anggaran pengeluaran lebih besar dari penerimaan. Anggaran surplus digunakan jika pemerintah ingin mengatasi masalah inflasi. Sedangkan anggaran defisit digunakan jika pemerintah ingin mengatasi masalah pengangguran dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Jika pemerintah merencanakan peningkatan pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi angka pengangguran maka pemerintah dapat meningkatkan pengeluarannya. Pengeluaran pemerintah terdiri dari pengeluaran rutin atau belanja aparatur daerah dan pengeluaran pembangunan atau belanja pelayanan publik (Anitasari dan Soleh, 2014).

a. Teori Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah versi Keynes, pengeluaran pemerintah merupakan salah satu unsur permintaan agregat. Konsep perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran bahwa $Y = C + I + G + X - M$. formula ini dikenal sebagai identitas pendapatan Nasional. Variabel Y

melambangkan pendapatan nasional sekaligus mencerminkan penawaran agregat. Sedangkan variabel-variabel di ruas kanan disebut permintaan agregat. Variabel G melambangkan pengeluaran pemerintah. dengan membandingkan nilai G terhadap Y serta mengamati dari waktu ke waktu dapat diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pembentukan pendapatan nasional menurut Dumairy (dalam Anitasari dan Soleh, 2014).

Teori pembangunan dan pengeluaran pemerintah dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. (1) tahap awal, pada tahap awal perkembangan ekonomi persentase investasi besar, sebab pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi dan sebagainya. (2) tahap menengah, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun peranan investasi swasta sudah semakin membesar. (3) tahap lanjut, pembangunan ekonomi dan aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua dan program pelayanan kesehatan masyarakat (Mangkoesobroto, 2001).

b. Teori Adolf Wagner

Pengamat empiris oleh Adolf Wagner terhadap Negara-Negara Eropa, Amerika Serikat dan Jepang pada abad ke 19 menunjukkan bahwa aktivitas pemerintah dalam perekonomian cenderung semakin meningkat. Wagner

mengukur perbandingan pengeluaran pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dengan mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam persentase terhadap PDB (Dumairy, 1997).

Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya (Mangkoesebroto, 1994). Temuannya kemudian oleh Richard A. Masgrave dinamakan Hukum Pengeluaran Pemerintah yang selalu Meningkat (*The Law of Growing Public Expenditure*). Sedangkan Wagner sendiri menamakannya sebagai Hukum Wagner yaitu Hukum Aktivitas Pemerintah yang selalu Meningkat (*The Law of Ever Increasing State Activity*) (Dumairy, 1997).

Hukum tersebut memberi dasar akan timbulnya kegagalan pasar dan eksternalitas. Sehingga Wagner menyadari bahwa dengan bertumbuhnya perekonomian akan menyebabkan hubungan antara industri dengan industri dan hubungan industri dengan masyarakat akan semakin rumit dan kompleks. Sehingga potensi terjadinya kegagalan eksternalitas negatif semakin besar (Mangkoesebroto, 1994).

c. Pengeluaran Pemerintah Secara Mikro

Pengeluaran pemerintah secara mikro dimaksudkan untuk menyediakan barang public yang tidak dapat disediakan pihak swasta dan sebagai akibat

adanya kegagalan pasar (Walter Nicholson, 2002). Menurut Guritno (1997) secara mikroekonomi teori perkembangan pemerintah bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor persediaan barang public akan berinteraksi dengan penawaran untuk barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Pengeluaran pemerintah untuk barang publik akan menstimulasi pengeluaran untuk barang lain. Perkembangan pengeluaran pemerintah dipengaruhi faktor-faktor di bawah ini:

- 1) Perubahan permintaan akan barang publik
- 2) Perubahan dari aktifitas pemerintah dalam menghasilkan barang publik dan juga perubahan dari kombinasi faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi.
- 3) Perubahan kualitas barang public
- 4) Perubahan harga faktor-faktor produksi

d. Pengeluaran Pemerintah Secara Makro

Menurut sisi makroekonomi yang dikemukakan Musgrave (1989) adalah untuk menganalisis ukuran pemerintah sehingga dapat terlihat transaksi anggaran, perusahaan publik dan kebijakan publik. pengeluaran pemerintah untuk sektor publik bersifat elastis terhadap pertumbuhan ekonomi. semakin banyak pengeluaran pemerintah untuk sektor publik semakin banyak barang publik yang tersedia untuk masyarakat.

Sejalan seperti yang dikatakan Musgrave, Menurut Wagner (Guritno M, 1997) jika pendapatan perkapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah akan meningkat. Pengeluaran pemerintah yang

semakin meningkat akan memacu adanya kegagalan pasar dan eksternalitas. Kelemahan hukum Wagner adalah karena hukum tersebut tidak didasarkan pada suatu teori mengenai pemilihan barang-barang publik. Wagner mendasarkan pandangannya dengan suatu teori yang disebut organis mengenai pemerintah (*organic theory of the state*) yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat lainnya.

2. Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi

Model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave (Jhingan, 2014) yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, presentase investasi pemerintah terhadap total investasi lebih besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti misalnya pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi, dan sebagainya. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin besar. Peranan pemerintah tetap besar pada tahap menengah, oleh karena peranan swasta yang semakin besar ini banyak menimbulkan kegagalan pasar, dan menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak dan kualitas yang lebih baik.

Bahwa peranan atau campur tangan pemerintah masih sangat diperlukan yaitu apabila perekonomian sepenuhnya diatur oleh kegiatan di pasar bebas, bukan saja ketika perekonomian tidak selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh tetapi juga kestabilan kegiatan ekonomi tidak dapat diwujudkan. Akan tetapi fluktuasi kegiatan ekonomi yang lebar dari satu periode ke periode lainnya dan ini akan menimbulkan implikasi yang serius kepada kesempatan kerja dan pengangguran serta tingkat harga (Keynes, 2000).

Rostow menyatakan bahwa pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran- pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti halnya, program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat dan sebagainya.

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah (Mangkoesebroto, 1999). Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Teori mengenai pengeluaran pemerintah dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu teori makro dan teori mikro. Dalam penelitian ini mengedepankan teori dari sisi makro. Teori makro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah dikemukakan oleh para ahli ekonomi dan dapat digolongkan ke dalam tiga golongan, yaitu model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah, hukum wagner mengenai perkembangan aktivitas pemerintah, teori Peacock dan Wiseman. Sedangkan menurut Peacock dan Wiseman (Mangkoesebroto, 1993) mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai

suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Teori Peacock dan Wiseman mengemukakan bahwa perkembangan ekonomi akan menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah, dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.

Pendapat Peacock dan Wiesman yang mengemukakan adanya peran pemungutan pajak dalam pembiayaan pengeluaran pemerintah didukung oleh teori Erick Lindahl. Menurut Lindahl, penyediaan infrastruktur dilakukan pemerintah melalui pemungutan pajak kepada semua masyarakat yang berstatus wajib pajak dengan porsi yang sama. Namun, untuk mengantisipasi ketidakpuasan masyarakat dengan tarif pajak yang diberlakukan untuk ketersediaan infrastruktur maka pemerintah memberlakukan tarif pajak sesuai dengan kemampuan masyarakatnya. Meskipun, dengan tarif pajak yang diberlakukan kepada masyarakat berbeda-beda tapi pemerintah berharap penerimaan dari pajak tetap sama dengan pemberlakuan tarif pajak yang sama kepada masyarakatnya.

Menurut Arndt (1998) menyatakan bahwa kebijakan public dalam kaitan dengan kebijakan pengeluaran pemerintah didasarkan pada situasi bahwa pasar tidak bisa berperan sendiri mengaktifkan mobilisasi aktivitas ekonomi terutama untuk mencapai efisiensi. Adanya pengeluaran publik disebabkan adanya

kegagalan pasar. Menurut Rao (1998) kegagalan pasar tersebut disebabkan:

- a. Tidak semua barang dan jasa diperdagangkan;
- b. Barang-barang yang menyebabkan eksternalitas dalam produksi maupun konsumsi memaksa suatu pertentangan antara harga pasar dengan penilaian sosial, dan pasar tidak bisa memastikan untuk memenuhi kondisi yang diinginkan.
- c. Beberapa barang mempunyai karakteristik *increasing returns to scale*. Dalam kondisi monopoli alami seperti itu masyarakat dapat memperoleh harga lebih rendah dan output lebih tinggi apabila pemerintah berperan sebagai produsen atau ada subsidi pada sector swasta untuk menutup biaya karena berproduksi secara optimal.
- d. Informasi asimetri antara produsen dan consume di bidang jasa seperti asuransi sosial dapat memberi peningkatan *moral hazard* dan pemilihan yang kurang baik. Oleh karena itu, intervensi pemerintah diperlukan agar menjamin pendistribusian kembali pendapatan.

Menurut Mundle (1998), kemajuan teori dan studi empiris mengenai intervensi kebijakan public dalam pembangunan manusia mencerminkan tumbuhnya perhatian masyarakat terhadap aspek yang berkaitan dengan pembangunan sosial. Pengeluaran pemerintah adalah bagian dari kebijakan fiskal (Sukirno, 2000), yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional.

Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga dan tingkat output untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

(Penyusunan APBN Indonesia, 2014) Pembagian belanja Negara menurut organisasi, di level pusat hanya berlaku untuk belanja pemerintah pusat. Secara umum, anggaran belanja Pemerintah Pusat menurut organisasi dibagi ke dalam 2 kelompok besar, yaitu (1) anggaran yang dialokasikan melalui bagian anggaran kementerian Negara/lembaga dengan Menteri/Pimpinan lembaga selaku penggunaan anggaran (*chief operation officer*), dan (2) anggaran yang dialokasikan melalui bagian anggaran Bendahara Umum Negara (BUN) melalui Menteri keuangan selaku Bendahara Umum Negara (*Chief Financial Officer*).

Menurut jenis belanja (klasifikasi ekonomi), anggaran belanja pemerintah pusat dibagi ke dalam (1) belanja pegawai; (2) belanja barang; (3) belanja modal; (4) pembayaran bunga utang; (5) subsidi; (6) belanja hibah; (7) bantuan sosial; dan (8) belanja lain-lain.

3. Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Teori ekonomi mengartikan atau mendefinisikan investasi sebagai "pengeluaran- pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan".

Menurut Boediono (1999) investasi adalah pengeluaran oleh sektor produsen (swasta) untuk pembelian barang dan jasa untuk menambah stok yang

digunakan atau untuk perluasan pabrik. Dornbusch & Fischer berpendapat bahwa investasi adalah permintaan barang dan jasa untuk menciptakan atau menambah kapasitas produksi atau pendapatan di masa mendatang. Persyaratan umum pembangunan ekonomi suatu negara menurut Todaro (1981) adalah:

- a. Akumulasi modal, termasuk akumulasi baru dalam bentuk tanah, peralatan fisik dan sumber daya manusia;
- b. Perkembangan penduduk yang dibarengi dengan pertumbuhan tenaga kerja dan keahliannya;
- c. Kemajuan teknologi.

Akumulasi modal akan berhasil apabila beberapa bagian atau proporsi pendapatan yang ada ditabung dan diinvestasikan untuk memperbesar produk (output) dan pendapatan di kemudian hari. Untuk membangun itu mengalihkan sumber-sumber dari arus konsumsi dan kemudian mengalihkannya untuk investasi dalam bentuk "*capital formation*" untuk mencapai tingkat produksi yang lebih besar. Investasi di bidang pengembangan sumberdaya manusia akan meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia, sehingga menjadi tenaga ahli yang terampil yang dapat memperlancar kegiatan produktif.

Menurut Sadono Sukirno (2000) kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yaitu (1) investasi merupakan salah satu komponen dari

pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja; (2) penambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi; (3) investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi. Suryana (2001) menyatakan bahwa kekurangan modal dalam Negara berkembang dapat dilihat dari beberapa sudut:

- a. Kecilnya jumlah mutlak kapita material;
- b. Terbatasnya kapasitas dan keahlian penduduk;
- c. Rendahnya investasi netto.

Akibat keterbatasan tersebut, negara-negara berkembang mempunyai sumber alam yang belum dikembangkan dan sumber daya manusia yang masih potensial. Oleh karena itu untuk meningkatkan produktivitas maka perlu mempercepat investasi baru dalam barang-barang modal fisik dan pengembangan sumberdaya manusia melalui investasi di bidang pendidikan dan pelatihan. Hal ini sejalan dengan teori perangkap kemiskinan (*vicious circle*) yang berpendapat bahwa: (1) ketidakmampuan untuk mengarahkan tabungan yang cukup, (2) kurangnya perangsang untuk melakukan penanaman modal, (3) taraf pendidikan, pengetahuan dan kemahiran yang relatif rendah merupakan tiga faktor utama yang menghambat terciptanya pembentukan modal di Negara berkembang.

Teori Harrod-Domar mengemukakan bahwa model pertumbuhan ekonomi yang merupakan pengembangan dari teori Keynes. Teori tersebut menitikberatkan pada peranan tabungan dan industri sangat menentukan dalam pertumbuhan ekonomi daerah (Lincoln Arsyad, 1997).

Beberapa asumsi yang digunakan dalam teori ini adalah bahwa:

- a. Perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh (*full employment*) dan barang-barang modal yang ada di masyarakat digunakan secara penuh.
- b. Dalam perekonomian dua sektor (Rumah Tangga dan Perusahaan) berarti sektor pemerintah dan perdagangan tidak ada
- c. Besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya pendapatan nasional, berarti fungsi tabungan dimulai dari titik original (nol)
- d. Kecenderungan untuk menabung (*Marginal Propensity to Save – MPS*) besarnya tetap, demikian juga ratio antar modal dan output (*Capital Output Ratio – COR*) dan rasio penambahan modal-output (*Incremental Capital Output Ratio*).

Teori ini memiliki kelemahan yaitu kecendrungan menabung dan ratio penambahan modal-output dalam kenyataannya selalu berubah dalam jangka panjang. Demikian pula proporsi penggunaan tenaga kerja dan modal tidak konstan, harga selalu berubah dan suku bunga dapat berubah akan mempengaruhi investasi. Dalam model pertumbuhan endogen dikatakan bahwa hasil investasi akan semakin tinggi bila produksi agregat di suatu negara semakin besar. Dengan diasumsikan bahwa investasi swasta dan publik di bidang sumberdaya atau modal manusia dapat menciptakan ekonomi eksternal (*eksternalitas positif*) dan memacu produktivitas yang mampu mengimbangi kecenderungan ilmiah penurunan skala hasil. Meskipun teknologi tetap diakui memainkan peranan yang sangat penting, namun model pertumbuhan endogen menyatakan bahwa teknologi tersebut tidak perlu

ditunjukkan untuk menjelaskan proses terciptanya pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Implikasi yang menarik dari teori ini adalah mampu menjelaskan potensi keuntungan dari investasi komplementer (*complementary investment*) dalam modal atau sumberdaya manusia, sarana prasarana infrastruktur atau kegiatan penelitian.

Mengingat investasi komplementer akan menghasilkan manfaat personal maupun sosial, maka pemerintah berpeluang untuk memperbaiki efisiensi alokasi sumberdaya domestik dengan cara menyediakan berbagai macam barang publik (sarana infrastruktur) atau aktif mendorong investasi swasta dalam industri padat teknologi dimana sumberdaya manusia diakumulaskannya. Dengan demikian model ini menganjurkan keikutsertaan pemerintah secara aktif dalam pengelolaan investasi baik langsung maupun tidak langsung.

Investasi swasta di Indonesia dijamin keberadaannya sejak dikeluarkannya Undang Undang No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Undang Undang No.12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Berdasarkan sumber dan kepemilikan modal, maka investasi swasta dibagi menjadi penanaman modal dalam negeri dan asing. Dengan semakin besarnya investasi pemerintah pada barang publik maka diharapkan akan mendorong pertumbuhan sektor pertumbuhan sektor swasta dan rumah tangga dalam mengalokasikan sumberdaya yang ada di suatu daerah. Hal ini pada akhirnya akan menyebabkan makin meningkatnya PDRB.

4. Angkatan Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Todaro (2000) pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan Angkatan Kerja (AK) secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah tingkat produksi, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar. Meski demikian hal tersebut masih dipertanyakan apakah benar laju pertumbuhan penduduk yang cepat benar-benar akan memberikan dampak positif atau negatif dari pembangunan ekonominya.

Pengaruh positif atau negatif dari pertumbuhan penduduk tergantung pada kemampuan sistem perekonomian daerah tersebut dalam menyerap dan secara produktif memanfaatkan pertambahan tenaga kerja tersebut. Kemampuan tersebut dipengaruhi oleh tingkat dan jenis akumulasi modal dan tersedianya input dan faktor penunjang seperti kecakapan manajerial dan administrasi. Dalam model sederhana tentang pertumbuhan ekonomi pada umumnya pengertian tenaga kerja diartikan sebagai angkatan kerja yang bersifat homogen menurut Lewis, angkatan kerja yang homogeny dan tidak terampil dianggap bisa bergerak dan beralih dari sector tradisional ke sector modern secara lancar dan dalam jumlah terbatas. Dalam keadaan demikian penawaran tenaga kerja mengandung elastisitas yang tinggi. Meningkatnya permintaan atas tenaga kerja (dari sector tradisional) bersumber pada ekspansi kegiatan sektor modern.

Dengan demikian salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi adalah tenaga kerja. (Nicholson W, 1991) bahwa suatu fungsi

produksi suatu barang atau jasa tertentu (q) adalah $q = f(K, L)$ dimana K merupakan modal dan L adalah tenaga kerja yang memperlihatkan jumlah maksimal suatu barang/jasa yang dapat diproduksi dengan menggunakan kombinasi alternative antara K dan L maka apabila salah satu masukan ditambah satu unit tambahan dan masukan lainnya dianggap tetap akan menyebabkan tambahan keluaran yang dapat diproduksi.

Tambahan keluaran yang diproduksi inilah yang disebut dengan produksi fisik marjinal (*Marginal Physical Product*). Selanjutnya dikatakan bahwa apabila jumlah tenaga kerja ditambah terus menerus sedang faktor lain dipertahankan konstan, maka pada awalnya akan menunjukkan peningkatan produktivitas namun pada suatu tingkat tertentu akan memperlihatkan penurunan produktivitasnya serta setelah mencapai tingkat keluaran maksimal setiap penambahan tenaga kerja akan mengurangi pengeluaran.

Tenaga kerja adalah mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, sedang mencari dan melakukan kegiatan lain, seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga menurut Simanjuntak (dalam Eliza, 2015). Menurut BPS penduduk berumur 10 tahun keatas terbagi sebagai Angkatan Kerja (AK) dan bukan AK. Angkatan Kerja dikatakan bekerja bila mereka melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 1 (satu) jam secara kontinu selama seminggu yang lalu. Sedangkan penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan disebut menganggur (Budi Santosa, 2011) jumlah angkatan kerja yang bekerja merupakan gambaran kondisi dari lapangan kerja yang tersedia. Semakin bertambah besar lapangan kerja yang

tersedia makan akan menyebabkan semakin meningkatkan total produksi di suatu daerah.

5. Modal Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi

Modal manusia dalam terminologi ekonomi sering digunakan untuk bidang pendidikan, kesehatan dan berbagai kapasitas manusia lainnya yang ketika bertambah dapat meningkatkan produktivitas. Pendidikan memainkan peran kunci dalam hal kemampuan suatu perekonomian untuk mengadopsi teknologi modern dan dalam membangun kapasitasnya bagi pembangunan dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Kesuksesan dalam pendidikan bergantung juga pada kecukupan kesehatan, disamping itu kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas. Dengan demikian kesehatan dan pendidikan dapat juga dilihat sebagai komponen vital dalam pertumbuhan dan pembangunan sebagai input bagi fungsi produksi agregat (Todaro 2002).

Menurut Mill (Jhingan, 2014) pembangunan ekonomi sangat tergantung pada dua jenis perbaikan yaitu perbaikan dalam tingkat pengetahuan masyarakat dan perbaikan yang berupa usaha-usaha untuk menghapus penghambat pembangunan seperti adat istiadat, kepercayaan dan berfikir tradisional. Perbaikan dalam pendidikan, keajuan dalam ilmu pengetahuan perluasan spesialisasi dan perbaikan dalam organisasi produksi merupakan faktor yang penting yang akan memperbaiki mutu dan efisiensi faktor-faktor produksi dan akhirnya menciptakan pembangunan ekonomi. Menurut Mill, faktor pendidikan melaksanakan dua fungsi yaitu: mempertinggi pengetahuan teknik masyarakat dan mempertinggi ilmu pengetahuan umum. Pendidikan dapat menciptakan pandangan-pandangan dan kebiasaan modern dan besar perannya

untuk menentukan kemajuan ekonomi masyarakat.

Menurut Mankiw (2006) modal manusia adalah pengetahuan dan kemampuan yang diperoleh oleh para pekerja melalui pendidikan mulai dari program untuk anak-anak sampai dengan pelatihan dalam pekerjaan (*on the job training*) untuk para pekerja dewasa. Seperti halnya dengan modal fisik, modal manusia meningkatkan kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa. Untuk meningkatkan level modal manusia membutuhkan investasi dalam bentuk guru, perpustakaan dan waktu belajar.

Sementara itu untuk menyesuaikan dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, Negara-negara berkembang harus memperhatikan kualitas sumber daya manusia, dengan mewujudkan program-program spesifik yaitu (Samuelson dan Nordhaus, 2004):

- a. Mengendalikan penyakit serta meningkatkan kesehatan dan nutrisi. Meningkatkan standar kesehatan penduduk menyebabkan peningkatan produktivitas mereka sebagai tenaga kerja. Pusat kesehatan masyarakat dan penyediaan air bersih merupakan modal sosial yang bermanfaat.
- b. Meningkatkan pendidikan, menurunkan angka buta huruf dan melatih tenaga kerja.
- c. Manusia terdidik merupakan tenaga kerja yang lebih produktif karena mampu menggunakan modal secara lebih efektif mampu mengadopsi teknologi dan mampu belajar dari kesalahan.

Di atas semua itu, tidak boleh mengestimasi secara lebih rendah (*under estimate*) terhadap pentingnya sumber daya manusia, Backer (1993)

mengemukakan bahwa teori modal manusia telah menjadi pemikiran banyak pihak sejalan dengan berhasilnya umat manusia mengendalikan tingkat pertumbuhan penduduk menanggapi kekhawatiran Malthus akan adanya bencana bagi umat manusia bila penduduk terus bertambah. Teori modal manusia pada dasarnya membahas proses merumuskan bentuk investasi yang bisa ditanamkan kepada manusia, sebab manusia diakui sebagai salah satu sumber daya yang diperlukan dalam kegiatan produksi barang dan jasa dalam perekonomian.

Samuelson dan Nordhaus (2004) menyebutkan bahwa input tenaga kerja terdiri dari kuantitas dan keterampilan tenaga kerja. Banyak ekonomi percaya bahwa kualitas input tenaga kerja yaitu keterampilan, pengetahuan dan disiplin tenaga kerja merupakan elemen paling penting dalam pertumbuhan ekonomi. Suatu Negara yang mampu membeli berbagai peralatan canggih tapi tidak mempekerjakan tenaga kerja terampil dan terlatih tidak akan dapat memanfaatkan barang-barang modal tersebut secara efektif. Peningkatan melek huruf, kesehatan dan disiplin serta kemampuan menggunakan computer sangat meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Kubo dan Kim (1996) mengemukakan bahwa elemen pokok dari teori pertumbuhan Neo Klasik dapat diringkas sebagai berikut:

- a. Bahwa pendapatan perkapita suatu negara tumbuh pada tingkat perkembangan teknologi yang dari luar (*eksogen*)
- b. Bahwa pendapatan perkapita Negara-negara miskin cenderung tumbuh pada tingkat yang tinggi jika hal-hal ini tetap (*konvergen*).

Dalam perkembangannya model Neo Klasik dikritik oleh Model Pertumbuhan Endogen, yang diawali oleh Romer (1986) dan Lucas (1988) yang mengasumsikan tingkat pengembalian yang konstan atau meningkat terhadap modal. Teori Pertumbuhan Endogen membangun komponen endogen perkembangan teknologi sebagai bagian integral dari teori pertumbuhan. Teori ini juga berusaha menjelaskan observasi yang berbeda terhadap pendapatan per kapita berbagai negara dimana model Neo Klasik gagal ditetapkan. Faktor-faktor seperti modal manusia dan pengeluaran riset dan pengembangan digabungkan sebagai komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dalam model itu. Lucas (1988) berargumen bahwa akumulasi modal manusia melalui investasi (misal meningkatkan waktu belajar) mendorong pertumbuhan endogen. Argumentasinya menekankan pada keuntungan yang disebabkan oleh eksternalitas dari modal manusia yang cenderung meningkatkan tingkat pengembalian modal manusia. Romer (1990) menyebutkan bahwa modal manusia merupakan input kunci pokok untuk sektor riset karena menyebabkan ditemukannya produk baru/ide yang disadari sebagai pendorong perkembangan teknologi.

Dengan demikian, negara-negara dengan stok awal modal manusia yang lebih tinggi, ekonominya tumbuh lebih cepat. Dengan demikian modal manusia disadari merupakan sumber pertumbuhan yang penting dalam teori pertumbuhan endogen (Kubo dan Kim, 1996).

Bank Dunia (1991) mengemukakan bahwa terdapat tiga alternative pola pertumbuhan :

a. Pola I, Pertumbuhan yang Tidak Berkesinambungan : pada pola ini

ekonomi tumbuh pada beberapa fase pertumbuhan yang pesat, namun tingkat pertumbuhannya menurun, stagnan atau hampir stagnan.

- b. Pola II, Pertumbuhan yang Terdistorsi yang ditandai dengan resiko kerusakan sumberdaya alam, kurangnya investasi dalam modal manusia dan subsidi untuk modal fisik.
- c. Pola III, pertumbuhan yang berkesinambungan melalui akumulasi aset yang tidak terdistorsi atau seimbang, dengan dukungan publik terhadap pengembangan pendidikan primer dan sekunder, perbaikan kesehatan public dan perlindungan alam.

Pertumbuhan dalam modal fisik bisa saja melimpah ke modal manusia melalui investasi swasta dalam riset dan pengembangan serta pelatihan dalam teknologi yang lebih tinggi yaitu dalam pertumbuhan yang didorong oleh teknologi. Untuk dapat melestarikan pertumbuhan angkatan kerja sebagian besar (dan semakin meningkat besarnya) harus memiliki latar belakang sekolah umum yang cukup supaya dapat menguasai keterampilan teknologi serta berpartisipasi dalam perluasan aktivitas riset dan pengembangan. Oleh karena itu sekolah umum yang disediakan secara publik dan pengetahuan yang dihasilkan secara privat bersifat komplementer.

Ranis dan Stewart (2006) mengemukakan bahwa pembangunan manusia secara luas didefinisikan sebagai mengusahakan orang-orang untuk menjalani hidup lebih lama, lebih sehat dan lebih penuh. Secara sempit, pembangunan manusia diinterpretasikan sebagai refleksi dari status kesehatan dan pendidikan manusia. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia merupakan hubungan dua arah yang kuat. Di satu sisi

pertumbuhan ekonomi menyediakan sumber-sumber yang memungkinkan terjadinya perkembangan secara berkelanjutan dalam pembangunan manusia. Sementara sisi lain pengembangan secara berkelanjutan dalam kualitas modal manusia merupakan kontributor penting bagi pertumbuhan ekonomi. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia berlangsung melalui penciptaan lapangan kerja. Aspek ini sangat penting karena sesungguhnya penciptaan lapangan kerja merupakan jembatan utama yang mengaitkan antara keduanya (UNDP, 1996).

Hubungan atas-bawah antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia menunjukkan bahwa melalui upaya pembangunan manusia berkemampuan dasar dan berketerampilan. Tenaga kerja termasuk petani, pengusaha dan manajer akan meningkat. Selain itu pembangunan manusia akan mempengaruhi jenis produksi domestik, kegiatan riset dan pengembangan teknologi yang pada akhirnya mempengaruhi komposisi output dan ekspor suatu negara. Kuatnya hubungan timbal balik antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia akan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor kelembagaan pemerintah, distribusi sumber daya swasta dan masyarakat, modal sosial, lembaga swadaya masyarakat dan ormas. Faktor-faktor kelembagaan pemerintah jelas peranannya karena keberadaanya sangat menentukan implementasi kebijakan publik. Faktor distribusi sumber daya juga jelas karena tanpa distribusi sumber daya yang merata (misal dalam penguasaan lahan atau sumber daya ekonomi lainnya) hanya akan menimbulkan frustrasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan terhadap sistem dan perilaku pemerintah. Semua faktor- faktor

tersebut berperan sebagai katalisator bagi berlangsungnya hubungan timbal balik antara keduanya secara efisien.

6. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan (Todaro dan Smith, 2006). Jadi pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian. Dari suatu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan oleh penambahan faktor-faktor produksi baik dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah barang modal dan teknologi yang digunakan juga makin berkembang. Disamping itu tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk seiring dengan meningkatnya pendidikan dan keterampilan mereka.

Model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentasi investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti misalnya pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi, dan sebagainya.

Menurut Arsyad (1999) pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik Bruto/Pendapatan Nasional Bruto tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting guna menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi suatu negara. "pertumbuhan" (*growth*) tidak identik dengan "pembangunan" (*development*). Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu syarat dari banyak syarat yang diperlukan dalam proses pembangunan (Meier,1989). Pertumbuhan ekonomi hanya mencatat peningkatan produksi barang dan jasa secara nasional, sedang pembangunan berdimensi lebih luas.

Salah satu sasaran pembangunan ekonomi adalah meningkatkan laju pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan pertumbuhan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) menurut harga konstan. Laju pertumbuhan PDB akan memperlihatkan proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi biasanya akan dilihat dalam kurun waktu tertentu, misalnya tahunan. Aspek tersebut relevan untuk dianalisa sehingga kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah untuk mendorong aktivitas perekonomian domestik dapat dinilai efektifitasnya.

a. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

Menurut ekonomi klasik, Adam Smith, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk (Arsyad, 1999). Unsur-unsur pokok dari system produksi suatu Negara ada tiga, yaitu:

- 1) Sumber daya alam yang tersedia merupakan wadah paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat dimana jumlah sumber daya alam yang tersedia mempunyai batas maksimum bagi pertumbuhan suatu perekonomian.
- 2) Sumber daya (jumlah penduduk) merupakan peran pasif dalam proses pertumbuhan output, maksudnya jumlah penduduk akan menyesuaikan dengan kebutuhan akan tenaga kerja.
- 3) Stok modal merupakan unsur produksi yang sangat menentukan tingkat pertumbuhan output. Laju pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh produktivitas sektor-sektor dalam menggunakan faktor-faktor produksinya. Produktivitas dapat ditingkatkan melalui berbagai sarana pendidikan, pelatihan dan manajemen yang lebih baik.

Menurut Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik, pertumbuhan ekonomi bergantung pada faktor-faktor produksi (Sukirno, 1994). Sehingga persamaannya dapat ditulis sebagai berikut:

$$\Delta Y = f(\Delta K, \Delta L, \Delta T)$$

Keterangan :

ΔY = Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

ΔK = Tingkat Penambahan Barang Modal

ΔL = Tingkat Penambahan Tenaga Kerja

ΔT = Tingkat Penambahan Teknologi

b. Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo Klasik

Model pertumbuhan ekonomi Neo Klasik Solow (*Solow Neo Classical Growth Model*) maka fungsi produksi agregat standar adalah sama seperti yang digunakan dalam persamaan sektor modern Lewis, yaitu:

$$Y = A e^{\mu t} \cdot K^{\alpha} \cdot L^{1-\alpha}$$

Keterangan :

Y = Produksi Domestik Bruto

K = Stok Modal Fisik dan Modal Manusia

L = Tenaga Kerja Non Terampil

A = Konstanta yang Merefleksikan Tingkat Teknologi Dasar

ϵ = Melambangkan Tingkat Kemajuan Teknologi

α = melambangkan elastisitas output terhadap modal, yaitu persentase kenaikan PDB yang bersumber dari 1% penambahan modal fisik dan modal manusia.

Menurut teori pertumbuhan Neo Klasik Tradisional, pertumbuhan output selalu bersumber darisatu atau lebih dari 3 (tiga) faktor yaitu kenaikan kualitas dan kuantitas tenaga kerja, penambahan modal (tabungan dan investasi) dan penyempurnaan teknologi (Todaro 2000).

B. Tinjauan Empiris

Sebelum melakukan penelitian ini penulis melakukan kajian dan mempelajari lebih dalam terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang diangkat oleh penulis. Berikut ini adalah ringkasan penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan pada penelitian ini:

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bengkulu

Judul	Pengaruh pengeluaran Pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu
Penulis	Merri Anitasari dan Ahmad Soleh (2014)
Variable	Pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi
Tujuan Penulisan	Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana pengaruh dari pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu dengan menggunakan data sekunder periode pengamatan 2001-2012 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik.
Alat Analisis	Jenis data yang digunakan adalah data panel yaitu gabungan time series dan cross section.
Kesimpulan	Hasil analisis menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Bengkulu. Jika pemerintah menaikkan

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia

	<p>pengeluaran pemerintah sebesar 1 miliar rupiah, maka akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,17% per tahun. Sedangkan pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah kabupaten/kota menunjukkan bahwa dari jumlah 10 kabupaten/kota di provinsi Bengkulu, kabupaten Rejang Lebong dan kota Bengkulu yang memiliki hasil bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi disekitarnya. Kabupaten Bengkulu Utara memiliki pengaruh negatif sedangkan 7 kabupaten lainnya memiliki hasil yang positif namun tidak signifikan. Sebagian besar kabupaten di Provinsi Bengkulu dikategorikan sebagai daerah yang baru membangun yang merupakan hasil pemekaran pasca pemberlakuan otonomi daerah. Sehingga dalam jangka pendek pengeluaran pemerintah dianggap belum mampu menstimulus kegiatan sektor-sektor perekonomian serta memacu pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.</p>
Judul	Pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja serta kesejahteraan masyarakat di provinsi di Indonesia
Penulis	Rini Sulistiawati (2012)
Variable	Investasi, pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat.
Tujuan Penulisan	Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh investasi terhadap pertumbuhan, penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan sosial di Provinsi di Indonesia
Alat Analisis	Metode analisis yang dilakukan menggunakan data runtut waktu (times series) dari tahun 2006-2010 dan data Cross section dari Propinsi-propinsi di Indonesia. Dalam regresi panel pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan path analysis model dibawah SPSS dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$
Kesimpulan	Selama periode penelitian ditemukan bahwa variabel investasi memiliki pengaruh negatif tetapi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, invetasi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan pada kesejahteraan sosial, penyerapan tenaga kerja berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kesejahteraan sosial.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, Belanja Modal dan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pulau Jawa

Judul	Pengaruh investasi, tenaga kerja, belanja modal dan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di pulau jawa
Penulis	Phany Ineke Putri
Variable	Investasi domestic, realisasi FDI, tenaga kerja, pengeluaran modal, infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi
Tujuan Penulisan	Untuk menganalisis pengaruh investasi domestic, realisasi FDI, tenaga kerja, pengeluaran modal dan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa periode 2007-2011.
Alat Analisis	Penelitian ini menggunakan data panel yang dianalisis dengan metode kuadrat kecil (OLS) dan bantuan program eviews.
Kesimpulan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa investasi domestic, pengeluaran modal, tenaga kerja dan infrastruktur berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa. Sementara jalan bukan aspal berpengaruh positif tidak signifikan.

Pengaruh PAD, Tenaga Kerja dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali

Judul	Pengaruh PAD, tenaga kerja dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi bali
Penulis	Yesika Resianna Barimbing (2015)
Variable	pertumbuhan ekonomi, PAD, tenaga kerja dan investasi
Tujuan Penulisan	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh simultan dan parsial PAD, tenaga kerja dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi.
Alat Analisis	Data sekunder menggunakan data panel yang terdiri atas data time series selama lima tahun dan data cross section sebanyak Sembilan kabupaten/kota yang menghasilkan 45 observasi. Teknik analisis yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam regresi ini adalah dengan model analisis regresi linear berganda.
Kesimpulan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan PAD, tenaga kerja dan investasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di bali. Secara parsial PAD dan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Bali, sedangkan investasi tidak berpengaruh signifikan.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Buleleng

Judul	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Buleleng
Penulis	Luh Putu Rani Mayasari, Ni Kadek Sinarwati, Gede Adi Yuniarta
Variable	Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pemerintah Daerah Karakteristik Tujuan Anggaran, Pengawasan Intern, dan Kinerja
Tujuan Penulisan	Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris dan mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) pada Alokasi Belanja Modal dengan mempertimbangkan data yang dikumpulkan.
Alat Analisis	Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dari tahun 2011-2013 berupa Laporan Realisasi Anggaran dengan sumber Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Buleleng.
Kesimpulan	Hasil pengujian menunjukkan bahwa terdapat Pengaruh yang signifikan antara Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal dan Jumlah Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Kepulauan Riau Tahun 2010-2013)

Judul	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal dan Jumlah Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Kepulauan Riau Tahun 2010-2013)
Penulis	Raja Rita (2014)
Variable	Pendapatan Asli Daerah, Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi.
Tujuan Penulisan	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (Pada pemerintah

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal dan Jumlah Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Kepulauan Riau Tahun 2010-2013)

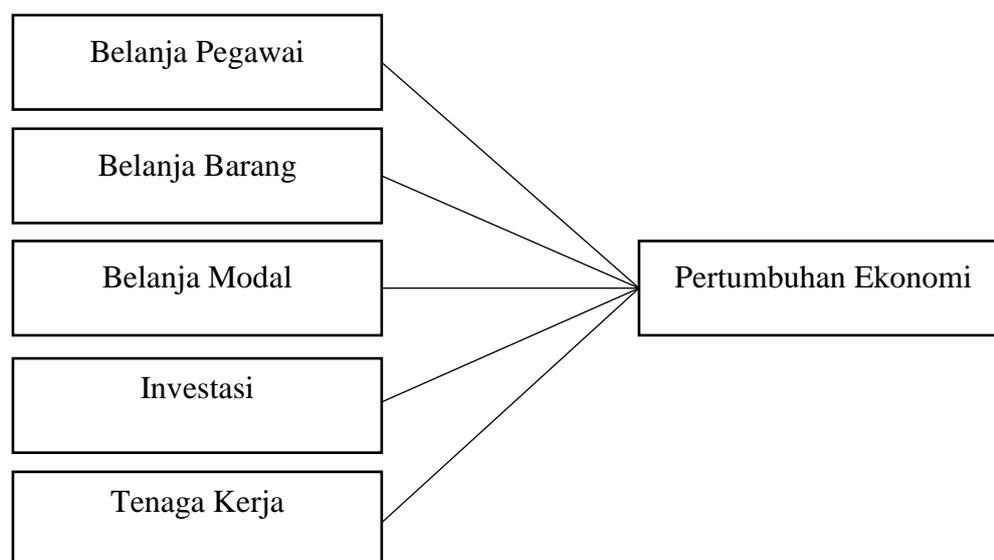
	Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau tahun 2010 – 2013).
Alat Analisis	Populasi dari penelitian ini adalah 7 Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, dan dari populasi ini diambil 7 Kabupaten/Kota sebagai sampel sehingga diperoleh 28 data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder bersifat kuantitatif, yang diperoleh dari BPS dan DJPK
Kesimpulan	Hasil pengujian menunjukkan bahwa belanja pegawai berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan asli daerah, belanja barang, belanja modal dan jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

C. Kerangka Berfikir

Pertumbuhan ekonomi suatu Negara dapat dilihat dan diukur dari tingkat kesejahteraan perekonomian suatu Negara itu sendiri. Apakah sudah sejahterakah masyarakat di wilayah tersebut faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah pengeluaran pemerintah yang dimana dalam penelitian ini variabel pengeluaran pemerintah meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Disamping itu dalam analisis makro tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara diukur dari perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai suatu negara atau daerah. Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu faktor dalam mendorong pertumbuhan ekonomi mengingat salah satu komponen dalam permintaan agregat adalah pengeluaran pemerintah. secara teori dinyatakan bahwa jika pengeluaran pemerintah meningkat maka permintaan agregat akan meningkat. Tingkat pengeluaran pemerintah meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal yang tinggi dapat meningkatkan

jumlah tenaga kerja dan meningkatkan jumlah investasi melalui angka penggandaan permintaan agregat. Dengan demikian, pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan output tergantung pada besarnya dan efektifitas angka penggandaan pengeluaran. Dapat dilihat dalam kerangka pemikiran berikut.

D. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

E. Hipotesis

Berdasarkan penjelasan dalam teori di atas dan penelitian terdahulu sebelumnya, penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga belanja pegawai berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 10 Provinsi di Pulau Sumatera.
2. Diduga belanja barang berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 10 Provinsi di Pulau Sumatera.
3. Diduga belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 10 Provinsi di Pulau Sumatera.

4. Diduga investasi berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 10 Provinsi di Pulau Sumatera.
5. Diduga tenaga kerja berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 10 Provinsi di Pulau Sumatera.
6. Diduga belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, investasi dan tenaga kerja secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 10 Provinsi di Pulau Sumatera.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari publikasi situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPk). Data yang digunakan adalah data panel, yaitu kombinasi data runtut waktu (*time series*) dan data silang tempat (*cross section*) yang meliputi 10 provinsi di Pulau Sumatera periode 2011-2016.

Dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) variable bebas yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, investasi dan tenaga kerja, 1 (satu) variable terikat yaitu pertumbuhan ekonomi. Pemilihan data panel dalam penelitian ini dikarenakan pertama, data panel yang merupakan gabungan dua data *time series* dan *cross section* mampu menyediakan data yang lebih banyak sehingga akan menghasilkan *degree of freedom* yang lebih besar. Kedua, menggabungkan informasi dari data *time series* dan *cross section* dapat mengatasi masalah yang timbul ketika ada masalah penghilangan variabel (*omitted-variabel*).

B. Definisi Operasional Variabel

Variabel terikat dari penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi dan variabel bebasnya adalah belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, investasi dan tenaga kerja. Berikut Tabel 3.1 yang menunjukkan data dan sumber data beserta satuan simbolnya.

Tabel 3.1. Data dan Sumber Data

Variabel	Simbol	Satuan	Sumber Data
Pertumbuhan Ekonomi	PE	Persen	BPS
Belanja Pegawai	BP	Persen	DJPK
Belanja Barang	BB	Persen	DJPK
Belanja Modal	BM	Persen	DJPK
Investasi	INV	Persen	BPS
Tenaga Kerja	TK	Persen	BPS

1. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan variabel bebas dalam penelitian ini yang diperoleh dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK).

Pengeluaran pemerintah dibagi lagi kedalam beberapa belanja yaitu:

a. Belanja Pegawai

Variabel belanja pegawai yang didapat dari total belanja pegawai langsung dan belanja pegawai tidak langsung terdiri dari 10 provinsi di Pulau Sumatera periode 2011-2016 dalam satuan miliar rupiah kemudian dirasioikan ke dalam bentuk persen (%).

b. Belanja Barang

Variabel belanja barang yang didapat dari total belanja langsung terdiri dari 10 Provinsi di Pulau Sumatera periode 2011-2016 dalam satuan miliar rupiah kemudian di rasioikan ke dalam bentuk persen (%).

c. Belanja Modal

Variabel belanja modal yang didapat dari total belanja langsung terdiri dari 10 Provinsi di Pulau Sumatera periode 2011-2016 dalam satuan miliar rupiah kemudian dirasioikan ke dalam bentuk persen (%).

2. Investasi

Investasi terbagi menjadi dua yaitu realisasi nilai penanaman modal dalam

negeri (PMDN) dan realisasi penanaman modal asing (PMA). Variabel investasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah total dari realisasi penanaman modal asing (PMA) dan realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN). Data yang di peroleh bersumber dari lembaga resmi Badan Pusat Statistik (BPS) yang terdiri dari 10 provinsi di Pulau Sumatera periode 2011-2016 dalam satuan miliar rupiah yang kemudian dirasioikan kedalam bentuk persen (%).

3. Tenaga Kerja

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah tenaga kerja. Data yang diperoleh bersumber dari lembaga resmi Badan Pusat Statistik (BPS) yang terdiri dari 10 provinsi di Pulau Sumatera peridoe 2011-2016 dalam satuan jiwa yang kemudian dirasioikan kedalam bentuk persen (%).

4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi merupakan variable terikat dalam penelitian ini yang di peroleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. Data yang di ambil merupakan data sekunder yang berupa kombinasi antara data runtut waktu (*time series*) dan data silang tempat (*cross section*) yang terdiri dari 10 Provinsi di Pulau Sumatera selama periode 2011-2016 dalam satuan persen (%).

C. Metode Analisis

Penelitian ini mengganakan alat analisis berupa *software computer* program Eviews9.

Data yang digunakan dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan analisis statistika yaitu persamaan regresi data panel. Menggunakan model umum sebagai berikut:

$$PE_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 X_{5it} + e$$

Ditransformasikan:

$$PE_{it} = \beta_0 + \beta_1 BP_{it} + \beta_2 BB_{it} + \beta_3 BM_{it} + \beta_4 INV_{it} + \beta_5 TK_{it} + e_{it}$$

Keterangan :

- PE = Pertumbuhan Ekonomi
- i = 1, 2, . . . n, menunjukkan data silang (cross section)
- t = 1, 2, . . . n, menunjukkan data runtut waktu (time series)
- β_0 = Konstanta
- $\beta_{1,2,3}$ = Koefisien regresi
- BP = Belanja pegawai
- BB = Belanja barang
- BM = Belanja modal
- INV = Investasi
- TK = Tenaga Kerja
- e = Error term

1. Metode Data Panel

Data panel adalah gabungan antara data silang (cross section) dengan data runtut waktu (time series), dengan mengakomodasi informasi baik yang terkait dengan variabel-variabel *cross section* maupun *time series*, data panel secara substansial mampu menurunkan masalah *omitted-variables*, model yang mengabaikan variabel yang relevan. Untuk mengatasi interkorelasi di antara variabel-variabel bebas yang pada akhirnya dapat mengakibatkan tidak tepatnya penaksiran regresi, metode data panel lebih tepat untuk digunakan. Analisis regresi data panel adalah analisis regresi yang didasarkan pada data panel untuk mengamati hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah, investasi dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi 10 Provinsi di Pulau Sumatera periode 2011-2016.

Terdapat tiga pendekatan yang dapat digunakan dalam mengestimasi data panel yaitu:

a. Pendekatan *Common Effects Model (CEM)*

Teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel adalah dengan mengkombinasikan data *time series* dan *cross section*. Dengan hanya menggabungkan data tersebut tanpa melihat perbedaan antar waktu dan individu maka kita bisa menggunakan metode OLS untuk mengestimasi model data panel. Metode ini dikenal dengan estimasi *Common Effect Model* (Widarjono,2016). Dalam pendekatan ini tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu, sehingga perilaku antar perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu.

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_n X_{nit} + e_{it}$$

keterangan :

Y_{it}	= Variabel terikat untuk unit i dalam waktu t
$X_{1it}, X_{2it}, X_{nit}$	= Variabel bebas untuk unit i dalam waktu t
β_0	= Intersep
$\beta_1, \beta_2, \beta_n$	= Koefisien slope
e_{it}	= Residual (error term)

b. Pendekatan *Fixed Model (FEM)*

Merupakan pendekatan yang mengasumsikan adanya perbedaan intersep didalam persamaan dikenal dengan model regresi *Fixed Effect Model*. Cara mengestimasi model adalah dengan menggunakan variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan intersep. Perbedaan karakteristik pemerintah dalam model ini hanya mengasumsikan intersep yang berubah antar individu dan tetap antar waktu, namun *slope* tetap antar pemerintah maupun antar waktu. Model estimasi ini juga disebut dengan *Least Square Dummy Variables* (Widarjono,2016). Model pendekatan ini adalah sebagai

berikut.

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 D_{3it} + \beta_4 D_{2i} + \beta_n D_{nit} + e_{it}$$

keterangan	:
Y_{it}	= Variabel terikat untuk unit i dalam waktu t
X_{1it}, X_{2it}	= Variabel bebas unyuk unit i dalam waktu t
β_0	= Intersep
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= Koefisien slope
D_1, D_2, D_n	= Variabel dummy
e_{it}	= Residual (error term)

c. Pendekatan *Random Effect Model (REM)*

Pendekatan variabel dummy dalam *fixed effect model* bertujuan untuk mewakili ketidaktahuan kita tentang model yang sebenarnya. Namun, ini juga membawa konsekuensi dengan berkurangnya derajat kebebasan (*degree of freedom*) yang pada akhirnya akan mengurangi efisiensi parameter. Masalah ini dapat diatasi dengan menggunakan variabel gangguan (*error terms*) dikenal sebagai metode *random effect*. Di dalam model ini kita akan mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin akan berhubungan antar waktu dan antar individu. Model adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_{0i} + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + v_{it}$$

keterangan;	
Y_{it}	= Variabel terikat untuk unit i dalam waktu t
$X_{1it}, X_{2it}, X_{3it}$	= Variabel bebas untuk unit i dalam waktu t
β_{0i}	= Intersep
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= Koefisien slope
v_{it}	= $e_{it} + \mu_i$

β_0 tidak lagi tetap atau nonstokastik tetapi bersifat random. β_{0i} adalah parameter yang tidak diketahui yang menunjukkan rata-rata intersep populasi dan μ_i adalah variabel gangguan yang bersifat random yang

menjelaskan adanya perbedaan perilaku perusahaan secara individu. Namun metode *random effect* berasal dari pengertian bahwa variabel gangguan v_{it} terdiri dari dua komponen yaitu variabel gangguan secara menyeluruh atau kombinasi *time series* dan *cross section* dan variabel gangguan secara individu. Dalam hal ini μ_i adalah berbeda antar individu dan tetap antar waktu. Karena itu model *random effect* juga sering disebut dengan *Error Component Model* (ECM). Karena adanya korelasi antara variabel gangguan, maka metode yang tepat untuk digunakan bukanlah OLS melainkan GLS atau *General Least Squares* (Widarjono,2016).

2. Pemilihan Model Data Panel

a. Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk mengetahui apakah teknik regresi panel dilakukan *common effect* dengan *fixed effect*. Adapun langkahnya dengan melihat koefisien determinasi (R^2) dan nilai *DW-statistics*. Nilai yang tinggi dari kedua pengujian tersebut akan mengindikasikan pemilihan model terbaik, apakah menggunakan metode *common effect* atau *fixed effect*. Perbandingan tersebut dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 = menerima model common effect, jika nilai Uji Chow < F-tabel

H_a = menerima model fixed effect, jika nilai Uji Chow > F-tabel

b. Uji Hausman

Uji Hausman adalah uji statistik yang digunakan untuk memilih apakah menggunakan model *Fixed Effect* atau *Random Effect*. Uji Hausman didasarkan pada heterogenitas antarindividu dan korelasinya dengan variabel bebas. Statistik uji Hausman mengikuti distribusi statistik *Chi*

Square dengan *degree of freedom* sebanyak k dimana k adalah jumlah variabel independen. Hipotesis yang digunakan dalam Uji Hausman adalah:

H_0 = memilih random effect jika nilai Hausman < nilai chi square

H_a = memilih fixed effect jika nilai Hausman > nilai chi square

Langkah untuk memilih model yang terbaik adalah dengan melihat *chi square statistics* dengan derajat kebebasan ($df = k$), dimana k adalah jumlah koefisien variabel yang diestimasi. Pada pengujian ini menunjukkan hasil yang signifikan artinya menolak H_0 maka model yang dipilih adalah *fixed effect*, namun sebaliknya jika hasilnya tidak signifikan artinya menerima H_0 maka model yang dipilih adalah *random effect*.

3. Pengujian Hipotesis

a. Uji Koefisien Regresi Secara Individual (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji koefisien dugaan dari masing-masing variabel independen, apakah secara terpisah berpengaruh nyata terhadap variabel dependennya atau tidak. Sehingga uji t dapat digunakan untuk menghitung koefisien regresi secara individu. Dalam pengujian ini, hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut:

a) Belanja pegawai terhadap pertumbuhan ekonomi:

$H_{01} : \beta_1 = 0$ tidak terdapat pengaruh antara belanja pegawai terhadap pertumbuhan ekonomi

$H_{a1} : \beta_1 > 0$ terdapat pengaruh positif signifikan antara belanja pegawai terhadap pertumbuhan ekonomi

b) Belanja barang terhadap pertumbuhan ekonomi:

H02 : $\beta_2 = 0$ tidak terdapat pengaruh antara belanja barang terhadap pertumbuhan ekonomi

Ha2 : $\beta_2 > 0$ terdapat pengaruh positif signifikan antara belanja barang terhadap pertumbuhan ekonomi

c) Belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi:

H03 : $\beta_3 = 0$ tidak terdapat pengaruh antara belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi

Ha3 : $\beta_3 > 0$ terdapat pengaruh positif signifikan antara belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi

d) Investasi terhadap pertumbuhan ekonomi:

H04 : $\beta_4 = 0$ tidak terdapat pengaruh antara investasi terhadap pertumbuhan ekonomi

Ha4 : $\beta_4 > 0$ terdapat pengaruh positif signifikan antara investasi terhadap pertumbuhan ekonomi

e) Tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi:

H05 : $\beta_5 = 0$ tidak terdapat pengaruh antara tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi

Ha5 : $\beta_5 > 0$ terdapat pengaruh positif signifikan antara tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi

Kriteria pengujian:

- 1) Ketika nilai t-hitung $>$ nilai t-tabel maka H_0 ditolak atau menerima H_a , artinya variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat.
- 2) Ketika nilai t-hitung $<$ nilai t-tabel H_0 diterima atau menolak H_a , artinya variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

b. Uji Signifikasi Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji koefisien dugaan secara serentak apakah variabel-variabel independen secara bersama-sama dapat menjelaskan variasi dari variabel dependen. Hipotesis yang akan diuji adalah :

$H_0 : \beta_{1, 2, 3, 4, 5} = 0$ Diduga secara bersama-sama variabel belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, investasi dan tenaga kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

$H_a : \beta_{1, 2, 3, 4, 5} \neq 0$ Diduga secara bersama-sama variabel belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, investasi dan tenaga kerja berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kriteria keputusan:

- 1) Ketika $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$ maka H_0 ditolak, artinya secara bersama-sama variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat
- 2) Ketika $F\text{-hitung} < F\text{-tabel}$ maka H_0 diterima, artinya secara bersama-sama variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui besarnya daya menerangkan dari variabel independen terhadap variabel dependen pada model tersebut. Nilai R^2 berkisar antara $0 < R^2 < 1$ sehingga kesimpulan yang diambil adalah:

- 1) Nilai R^2 mendekati nol artinya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen sangat terbatas.

- 2) Nilai R^2 mendekati satu artinya variabel independen memberikan hampir semua informasi untuk memprediksi variasi variabel dependen.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah, investasi dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi 10 Provinsi di Pulau Sumatera maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Variabel belanja pegawai berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 10 Provinsi di Pulau Sumatera.
2. Variabel belanja barang berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 10 Provinsi di Pulau Sumatera.
3. Variabel belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 10 Provinsi di Pulau Sumatera.
4. Variabel investasi berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 10 Provinsi di Pulau Sumatera.
5. Variabel tenaga kerja berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 10 Provinsi di Pulau Sumatera.
6. Secara bersama-sama variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 10 Provinsi di Pulau Sumatera.

B. Saran

Berdasarkan uraian dan pembahasan mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah, investasi dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi 10 Provinsi di Pulau

Sumatera, maka saran yang diberikan adalah:

1. Agar nilai korelasi belanja pegawai tinggi sebaiknya meningkatkan perputaran uang, misalnya melalui hiburan rakyat atau cara lain yang dapat meningkatkan perputaran uang di daerah. Mendorong konsumsi barang dan jasa hasil produksi daerah sendiri. mendorong perbankan yang ada di daerah supaya lebih aktif menyalurkan tabungan PNS ke masyarakat setempat, yaitu untuk kegiatan konsumtif tetapi terutama untuk kegiatan produktif.
2. Meningkatkan investasi swasta seperti menciptakan iklim investasi yang kondusif, menunjang hal-hal yang dapat meningkatkan investasi seperti infrastruktur yang memadai, kemudahan dalam proses investasi sehingga nilai penanaman investasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera. Mengupayakan minat kepada investor asing untuk menanamkan modal dan membelanjakan keuntungan dari hasil investasinya di dalam negeri sehingga para penanam modal asing tidak hanya sekedar menanamkan modal dan semata mata mengambil keuntungan. Namun tetap usahakan agar minat investor asing membelanjakan hasil keuntungannya di dalam negeri sehingga pergerakan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi akan bergerak kearah yang positif.
3. Ketersediaan lapangan pekerjaan baru yang dapat menekan angka pengangguran dengan semakin banyak orang yang bekerja atau produktif maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, selain itu diharapkan peningkatan produktifitas tenaga kerja melalui peningkatan alokasi anggaran serta memperluas kesempatan kerja sehingga output meningkat dan pada akhirnya dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Lebih meningkatkan skill dan kemampuan tenaga kerja agar menghasilkan tenaga kerja yang terlatih.

DAFTAR PUSTAKA

- Anitasari, Merri 2014. *Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia*. Universitas Bengkulu.
- Arndt, H. W. 1987. *Pembangunan dan pemerataan: Indonesia di Masa Orde Baru*. Jakarta: LP3ES.
- Arsyad, Lincolin., 1997. *Ekonomi Pembangunan*, STIE YKPN, Yogyakarta.
- Arsyad, Lincolin., 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah (edisi pertama)*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Arsyad, Lincolin., 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistika (BPS) Indonesia. *Jumlah Penduduk 15 tahun keatas Menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan*.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. *Laju Pertumbuhan PDRB atas Harga Konstan Menurut Provinsi*.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. *Realisasi Investasi Penanaman Modal Luar Negeri Menurut Provinsi*.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. *Realisasi Penanaman Modal dalam Negeri Menurut Provinsi*.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. *Realisasi Pengeluaran Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia dalam Angka*.
- Barimbing, Resianna, 2015. *Pengaruh PAD, Tenaga Kerja dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali*. E-Jurnal EP Unud.
- Becker, Grey Stanley, 1993. *Human Capital: a theoretical and empirical analysis, with special refrence to education 3rd edition*. London: The University of Chicago Press, Ltd.
- Boediono. 1999. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. BPEE Yogyakarta. Yogyakarta.

- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, *APBN Indonesia*. Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan.
- Direktorat Penusunan APBN 2014, *Postur APBN Indonesia*. Direktorat Jendral Anggaran dan Kementrian Keuangan.
- Eliza, Yuliana. 2015. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi dan Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat*. SNEMA.
- Grossman, L, 1995. *Ilmu Endodontik Dalam Praktek Edisi 11*, Jakarta: EGC,p. 248.
- Jhingan, M L, 2014. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kubo, Yuji, 1996. *Human Capital. Imported Technology and Economic Growth: A Comparative Study of Korea and Japan*. Institute of Policy and Planning Science University of Tsukuba, Tsukuba.
- Kuncoro, Mudrajad, 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Lucas, R.E., Jr 1998. *On The Mechanics od Economic Development. Journal of Monetary Economics*. Vol.2.2. 3-42.
- Mangkoesebroto, Guritno. 1993. *Ekonomi Publik (edisi 3)*. Yogyakarta BPFE UGM.
- Mangkoesebroto, Guritno. 1998. *Teori Ekonomi Makro*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Mankiw, Gregory, 2006. *Teori Makroekonomi Edisi keenam*. Terjemahan. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Meier, Kenneth J. Stewart, Joseph. England, Robert E. 1989. *Race, class, and education: the politics of second-generation discrimination*. Madison,WI: University of Wisconsin. ISBN 0-299-12210-7.
- Mundel, M.E., 1994. *Motions and Time Study Improving Productivity*. Pentice Hall. Inc. Englewood Cliffs, New Jersey, Canada.
- Mundel, M.E., 1998. *Financing Human Development: Some Lessons from Advanced Countries*. World Development 26 (4): 659-672.
- Nicholson, W, 1991. *Teori Ekonomi Mikro I*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Rita, Raja, 2014. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja pegawai, Belanja Brarang, Belanja Modal dan Jumlah Penduduk Terhadap*

Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Pada Pemerintah Kab/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2013). Universitas Maritim.

- Pangestu, 1996. *Satastistik Induktif*, Edisi 4, BPFE, Yogyakarta.
- Prasetyo, P.Eko, 2009. *Fundamental Makro ekonomi: Sebuah Pengetahuan Tingkat Dasar dan Menengah Serta Advanced untuk Ilmu Ekonomi Makro*. Yogyakarta: Beta Offset Hal 17.
- Putri, Phany, 2014. *Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, Belanja Modal dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pulau Jawa*. Journal of economics and policy. Universitas Jendral Soedirman.
- Ranis, G., Stewart, F., Samman, E., 2006. *Human Development: Beyond the Human Development Index*. Journal of Human Development.
- Romer, P. M, 1986. *Increasing Returns and Long-run Growth*. Journal of Political Economy. Vol.94. 1002-38.
- Romer, P. M, 1990. *Endogenous Technological Change*. Journal of Political Economy. Vol.98. S71-S102.
- Romer, P. M., 1994. *The Journal of Economic Perspective Vol. 8, No.1*. pp. 3-22.
- Samuelson, Paul, 2004. *Ilmu Makro Ekonomi*. Jakarta: PT. Media Edukasi.
- Santosa, Budi, 2011. *Analisis Pengaruh Kualitas Produk, Fasilitas, Kualitas Pelayanan, dan Promosi Terhadap Loyalitas Nasabah*.
- Sukirno, Sadono., 1994. *Pengantar Teori Ekonomi Makro*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sukirno, Sadono., 2000. *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta Rajawali Press.
- Sulistawati, Rini, 2012. *Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia*. Universitas Tanjungpura.
- Suryana. 2001. *Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan*. Jakarta: PT. Salemba Empat.
- Suryono, Agus, 2010. *Dimensi-dimensi Prima Teori Pembangunan*. UBPress, Malang.
- Todaro. M.P, 1981. *Economic Development in The Third World*, London: Longman.
- Todaro. M.P, 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Penerbit Erlangga, Jakarta.

- Todaro. M.P, 2006. *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Tumangkeng. Steeva, 2015. *Analisis Pengaruh investasi Swasta, Belanja modal dan tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Manado Tahun 2003-2012*. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- UNDP. 1996. *Human Develoment Report*. New York: United Nation.
- UNDP. 1996. *Human Develoment Report*. New York: Oxford University Press.
- Widarjono, Agus, 2007. *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*. Penerbit Ekonesia FE UI.
- Widarjono, Agus, 2013. *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*. Edisi Keempat: UPP STIM YKPN.
- Wihda, Muqsyithu, 2014. *Analisis Pengaruh PMDN, PMA, Pengeluaran Pemerintah dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Yohyakarta*. Diponogoro Journal Of Economics.